

LAPORAN KINERJA



KPKNL Samarinda

2021



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Samarinda pada Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Samarinda berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Samarinda telah menerapkan sistem *Balance Score Card* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Samarinda dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Samarinda dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, diperoleh nilai kinerja organisasi Kemenkeu *Three* KPKNL Samarinda Tahun 2021 sebesar 114,11%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja subbagian umum dan seksi-seksi di lingkungan KPKNL Samarinda sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Samarinda Tahun 2021.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diemban oleh KPKNL Samarinda sebagai instansi vertikal di daerah. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat **SIAP** (**S**inergi, **I**novatif **A**kuntabel dan **P**rofesionalisme) dan dilandasi oleh nilai-nilai organisasi kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempumaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Samarinda yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja kami dimasa mendatang.

Samarinda, 31 Januari 2022
Kepala kantor,



Bimo Aryo



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disampaikan kepada stakeholder melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Samarinda tahun 2021. Laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi KPKNL Samarinda, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Samarinda”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Samarinda adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Samarinda. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Samarinda Tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja DJKN Tahun 2021 yaitu:



1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;

Dengan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai 85,32% dari target sebesar 62% dengan persentase capaian sebesar 137,62%.
- b. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai Rp. 20.045.057.606,00 dari target sebesar Rp. 16.459.000.000,00 dengan persentase sebesar 121,79%.
- c. Tingkat Penurunan *outstanding* piutang negara berhasil tercapai sebesar Rp. 7.598.261.234,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan persentase capaian sebesar 151,97%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;

Dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara Dan Lelang terealisasi sebesar 99,04 dari target yang ditetapkan sebesar 92 dengan persentase sebesar 107,65%. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 182,06% dari target sebesar Rp. 150.000.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp. 273.087.943.996,00.

3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien;

Dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada kantor pelayanan terealisasi sebesar 4,78 dengan persentase sebesar 107,42% dari target sebesar 4,45.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;

Dengan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

- a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan capaian sebanyak 82 dengan persentase sebesar 100% dari target sebanyak 82.
- b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebanyak 32 dengan persentase sebesar 106,67% dari target sebesar 30.
- c. Deviasi ketergunaan hasil penilaian terealisasi sebesar 0,19% dengan persentase sebesar 199,14% dari target sebesar 22%.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;

Dengan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

- a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPn dengan capaian sebanyak 557 dengan persentase sebesar 139,25% dari target sebanyak 400.
- b. Persentase persentase produktivitas lelang dengan capaian lelang laku sebanyak 151 dari frekuensi lelang sebanyak 361 dengan persentase sebesar 41,83% dari target sebesar 35%.



- c. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan capaian sebanyak 361 lelang dari frekuensi lelang keseluruhan sebanyak 361, tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 92%.
- d. Deviasi Data PNBPFungsional DJKN dengan capaian sebesar 0% dengan persentase sebesar 200% dari target sebesar 12,50%.

6. Edukasi Yang Efektif;

Dengan Indikator Kinerja Utama Deviasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 96,04 dengan persentase sebesar 105,94% dari target sebesar 91.

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Dengan Indeks Kinerja Utama persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara yang ditargetkan sebesar 85% dapat terealisasi sebesar 98% dengan nilai capaian sebesar 115,29%.

8. SDM yang Kompeten;

Dengan Indeks Kinerja Utama persentase pengembangan kompetensi pegawai yang ditargetkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 120% dengan nilai capaian sebesar 120%.

9. Organisasi yang *Fit-for-Purpose*;

Dengan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

- a. Nilai hasil *review* pengelolaan Kinerja dengan target sebesar 75 dan terealisasi sebesar 96,04 dengan persentase capaian sebesar 128,05%.
- b. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator dengan target sebesar 80 dan terealisasi sebesar 99,50 dengan persentase capaian sebesar 124,38%.

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal;

Dengan Indeks Kinerja Utama persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan target ditetapkan sebesar 95,5% dapat terealisasi 96,09% dengan nilai capaian 100,62%.

Pada tahun 2021 KPKNL Samarinda berhasil meraih seluruh target capaian kinerja pada semua sasaran strategis dengan total NKO sebesar **114,11%**. Hal ini dapat terwujud berkat giatnya penggalian potensi pengelolaan kekayaan negara, lelang, dan piutang negara, serta adanya momentum mulai pulihnya kondisi perekonomian Indonesia. Didukung oleh pengelolaan sumber daya yang optimal serta dukungan para pemangku kepentingan, KPKNL Samarinda terus berusaha meningkatkan kinerja agar dapat memberikan pelayanan prima kepada setiap pengguna layanan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis Instansi	3
BAB II Perencanaan Kinerja	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja.....	13
C. Pengukuran Kinerja	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV Penutup	36
A. Simpulan	36
B. Hambatan dan Harapan	37

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat ditilik melalui ukuran pengelolaan keuangan yang sehat dan modern, pengukuran kinerja dengan indikator capaian, dan keterkaitan kegiatan dengan program instansi.

Dinamika organisasi merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam perkembangan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, penyelarasan peta proses bisnis Kementerian Keuangan, dan arah kebijakan kelembagaan secara nasional, Kementerian Keuangan khususnya DJKN terus melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan kelembagaan. Penyelarasan organisasi pemerintah sesuai dengan peta proses bisnis tersebut dilakukan agar instansi DJKN mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masa depan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- d. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

- e. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- f. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
- g. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- h. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- i. pelaksanaan pelayanan lelang;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

2. Struktur Organisasi

Guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi KPKNL dengan 1 (satu) subbagian, 6 (enam) seksi dan kelompok Jabatan Fungsional masing-masing di bawah Kepala Kantor dapat dilihat pada gambar berikut.



KPKNL Samarinda berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Samarinda dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didukung oleh 1 (satu) Subbagian Umum, 6 (enam) seksi, beserta Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang kerja yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPKNL Samarinda dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasinya sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang dirinci sesuai jabatan dan kedudukan sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Kepala Kantor | : 1 (satu) orang |
| b. Subbagian Umum | : 5 (lima) orang |
| c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | : 4 (empat) orang |
| d. Seksi Pelayanan Penilaian | : 2 (dua) orang |
| e. Seksi Piutang Negara | : 4 (empat) orang |
| f. Seksi Pelayanan Lelang | : 4 (empat) orang |
| g. Seksi Hukum dan Informasi | : 4 (empat) orang |
| h. Seksi Kepatuhan Internal | : 3 (tiga) orang |
| i. Jabatan Fungsional Pelelang | : 2 (dua) orang |
| j. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah | : 3 (tiga) orang |

B. PERAN STRATEGIS INSTANSI

Setiap pelayanan pada KPKNL Samarinda merupakan bentuk implementasi peran strategis DJKN guna pencapaian tujuan pada tiap bidang kerja. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis dalam

melaksanakan implementasi kebijakan terkait bidang-bidang tersebut. Tugas dan fungsi tersebut merupakan sarana organisasi dalam menjalankan tugas yang diemban demi mewujudkan tujuan organisasi, sesuai dengan kerangka visi dan langkah misi organisasi DJKN. Lebih lanjut, tugas dan fungsi KPKNL Samarinda dijabarkan dalam peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai instansi vertikal DJKN yang berperan dalam pengelola kekayaan negara, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penatausahaan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan fungsi DJKN sebagai *asset manager*, KPKNL Samarinda mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan. KPKNL Samarinda berperan membantu satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga untuk menciptakan penatausahaan barang milik negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi.

Untuk menuju optimalisasi tersebut KPKNL Samarinda berperan aktif dalam penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada tiap satuan kerja (satker) dalam wilayah kerja dengan tujuan utama sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran pembukuan BMN,
- b. Mewujudkan penatausahaan BMN di seluruh satuan kerja (satker) Pemerintah Pusat pada wilayah kerja KPKNL Samarinda,
- c. Melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

Saat ini, peran KPKNL Samarinda menjadi semakin strategis dikarenakan sebagian wilayah kerja KPKNL Samarinda direncanakan akan menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPKNL Samarinda dalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPKNL Samarinda terus berupaya meningkatkan kinerja yang baik khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan negara agar dapat menghasilkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang optimal.

2. Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Penilaian dilakukan untuk

meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara (BMN) lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN, dan pengurusan piutang negara (penilaian barang jaminan). Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah. Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusan kepada PUPN melalui KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Samarinda dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.



5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, KPKNL Samarinda memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Biaya Administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan senantiasa memberikan pelayanan yang prima, KPKNL Samarinda diharapkan dapat menghasilkan PNBP dan merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Sepanjang tahun 2021, KPKNL Samarinda telah berperan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.



Berbagai upaya pencegahan penyebaran *Novel Coronavirus* telah dilakukan mengingat virus tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Sebagai respons atas hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lebih lanjut, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pandemi *Covid-19* juga memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan, penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus melindungi pegawai dan *stakeholders* di masa pandemi melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Selain itu, penyesuaian proses bisnis terkait Piutang Negara juga dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Selanjutnya, proses bisnis terkait pelayanan Penilaian juga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Mengingat dampak pandemi *Covid-19* diperkirakan masih akan dirasakan selama beberapa tahun ke depan, Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan pandemi *Covid-19*. Respons tersebut berupa strategi-strategi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dirumuskan untuk mencapai kondisi-kondisi yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini. Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain dari sisi arah kebijakan dan strategi, target pada indikator kinerja dalam Renstra ini juga

mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target kinerja sehingga diperoleh proyeksi yang lebih realistis, mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu, *"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."* Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan di replikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;

- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

1. **Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial**

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;
- b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a) Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga;
- b) Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c) Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
- d) Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*.
- b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Lelang.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
- d. Komunikasi publik yang efektif

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a) Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b) Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c) Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DJKN melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, DJKN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Kantor Vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

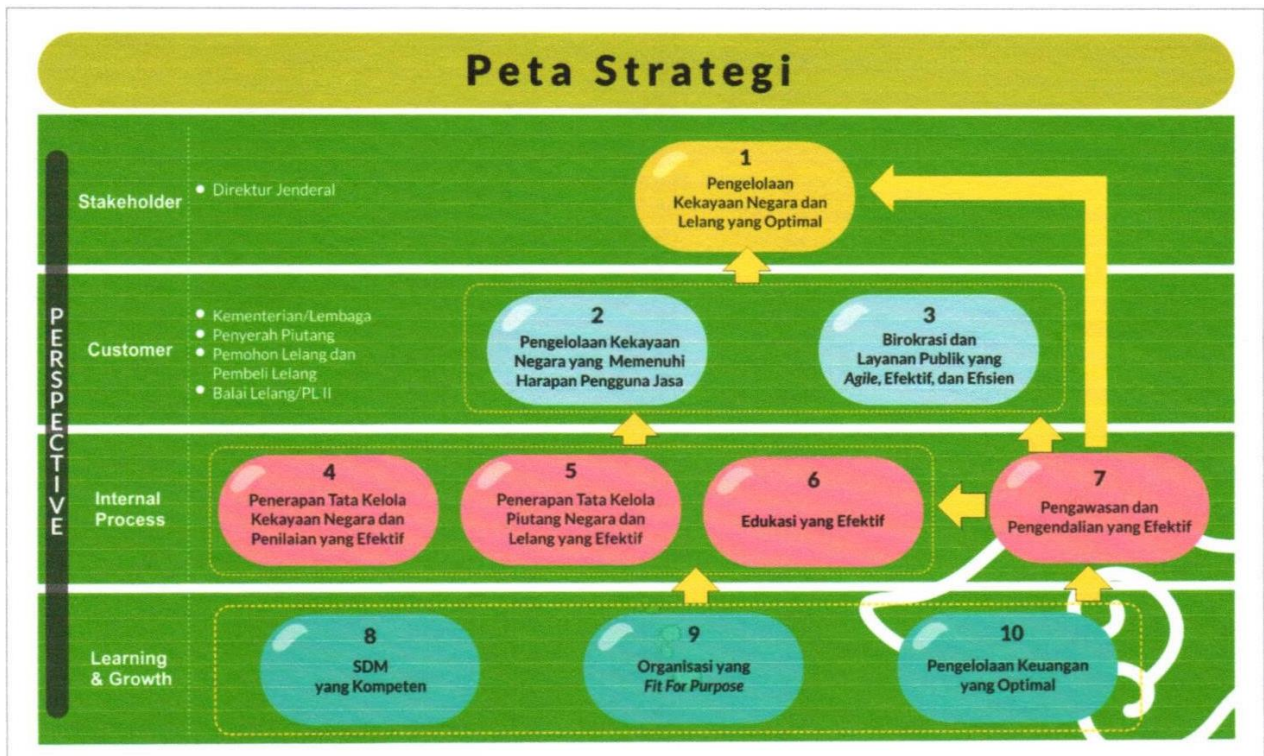
Perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersembahkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Samarinda mempunyai **visi dan misi** yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN yaitu, **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Samarinda menuangkan perencanaan kinerja tahun 2021 dalam sebuah Kontrak Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Samarinda sebagai berikut;

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	100%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp. 262.123.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp. 19.249.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp. 21.504.000
3. Pengelolaan Aset	Rp. 221.370.000
Dukungan Manajemen	Rp. 1.831.391.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp. 10.388.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp. 1.796.386.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 7.840.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp. 16.777.000



**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	92	92	92	92	92	92	92
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien								
	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,45	4,45
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								



	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif								
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	91	-	91	91	91
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8.	SDM yang Kompeten								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>								
	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%



Sasaran Kerja Pegawai

No	Kegiatan Tugas Pokok Jabatan	Angka Kredit	Target			
			Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu	Waktu	Biaya
1.	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 Bulan	-
2.	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 Bulan	-
3.	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 Bulan	-
4.	Mewujudkan ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	-	92 (skala 100)	100	12 Bulan	-
5.	Meningkatkan realisasi pokok lelang	-	100%	100	12 Bulan	-
6.	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,45 (skala 5)	100	12 Bulan	-
7.	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 Bulan	-
8.	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 Bulan	-
9.	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 Bulan	-
10.	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 Bulan	-
11.	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 Bulan	-
12.	Melaksanakan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-	92%	100	12 Bulan	-



13.	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN		87,5%	100	12 Bulan	-
14.	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi		91 (skala 100)	100	12 Bulan	
15.	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara		85%	100	12 Bulan	
16.	Mengembangkan kompetensi pegawai		100%	100	12 Bulan	
17.	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja		75	100	12 Bulan	
18.	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator		80	100	12 Bulan	
19.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran		95,5%	100	12 Bulan	



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output /Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Penerapan Tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif IKU: Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi	Percepatan sertipikasi BMN berupa tanah	1. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan di lingkup KPKNL Samarinda. 2. Jumlah bidang tanah BMN yang disampaikan kepada BPN dan direkomendasikan untuk disertifikasi.	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp 8.100.000,

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2021, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

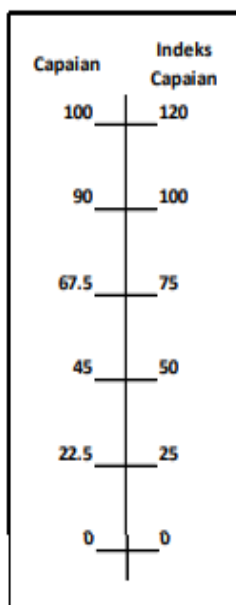
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize*
Indeks Capaian = $[1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *stabilize*

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik :



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal = $\text{Realisasi/Target} \times 100$

C_n = Capaian

- **Apabila Realisasi > Target**, maka

$$C_n = 100 - (C_a - 100)$$

note: C_a maksimum adalah 200

- **Apabila Realisasi < Target** maka $C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n

C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Samarinda untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPKNL Samarinda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPKNL Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal							
	1a-CP - Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	MAX/ TLK
Realisasi	88,24%	75,25%	75,25%	79,52%	79,52%	85,32%	85,32%	
Capaian	88,24%	75,25%	75,25%	79,52%	79,52%	85,32%	85,32%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal							
	1b-CP - Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	9,64%	52,69%	52,69%	78,05%	78,05%	121,79%	121,79%	
Capaian	9,64%	52,69%	52,69%	78,05%	78,05%	121,79%	121,79%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal							
	1c-CP - Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara (Saldo PNDS s.d. 2017)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	4,49%	7,31%	7,31%	146,95%	146,95%	151,97%	151,97%	
Capaian	4,49%	7,31%	7,31%	146,95%	146,95%	151,97%	151,97%	



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP - Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target	92	92	92	92	92	92	92	MAX/ AVG
Realisasi	99,90	98,36	99,13	99,29	99,18	98,61	99,04	
Capaian	99,90	98,36	99,13	99,29	99,18	98,61	99,04	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP - Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Pol /KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	15,70%	72,28%	72,28%	120,85%	120,85%	182,06%	182,06%	
Capaian	15,70%	72,28%	72,28%	120,85%	120,85%	182,06%	182,06%	

K-Wide	Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien							
	3a-CP - Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4,45	4,45	MAX/ AVG
Realisasi	-	-	-	-	-	4,78	4,78	
Capaian	-	-	-	-	-	4,78	4,78	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4a-CP - Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Pol/KP
Target	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	13,41%	98,78%	98,78%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	13,41%	98,78%	98,78%	100%	100%	100%	100%	



K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4b-CP - Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Po/KP
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	26,67%	90%	90%	106,67%	106,67%	106,67%	106,67%	
Capaian	26,67%	90%	90%	106,67%	106,67%	106,67%	106,67%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4c-CP - Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Po/KP
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	MIN/ TLK
Realisasi	0,00%	0,47%	0,47%	0,27%	0,27%	0,19%	0,19%	
Capaian	0,00%	0,47%	0,47%	0,27%	0,27%	0,19%	0,19%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP - Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Po/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	44,25%	91,75%	91,75%	122%	122%	139,25%	139,25%	
Capaian	44,25%	91,75%	91,75%	122%	122%	139,25%	139,25%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP - Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Po/KP
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	MAX/ TLK
Realisasi	70,73%	47,95%	47,95%	42,35%	42,35%	41,83%	41,83%	
Capaian	70,73%	47,95%	47,95%	42,35%	42,35%	41,83%	41,83%	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5c-CP - Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	Po/KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5d-CP - Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	MIN/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

K-Wide	Edukasi yang efektif							
	6a-N - Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	-	91	91	-	91	91	91	MAX/ TLK
Realisasi	-	96,45	96,45	-	96,45	96,36	96,40	
Capaian	-	96,45	96,45	-	96,45	96,36	96,40	

K-Wide	Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif							
	7a-CP - Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	MAX/ TLK
Realisasi	63,89%	72,00%	72,00%	96,00%	96,00%	98,00%	98,00%	
Capaian	63,89%	72,00%	72,00%	96,00%	96,00%	98,00%	98,00%	

K-Wide	SDM yang kompeten							
	8a-N - Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	43,48%	90,48%	90,48%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	52,17%	108,57%	108,57%	120%	120%	120%	120%	

K-Wide	Organisasi Yang <i>Fit For Purpose</i>							
	9a-N – Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	-	-	-	-	-	75	75	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	96,04	96,04	
Capaian	-	-	-	-	-	128,05%	128,05%	

K-Wide	Organisasi Yang <i>Fit For Purpose</i>							
	9b-N – Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	99,00	99,20	99,10	99,90	99,37	99,90	99,50	
Capaian	99,00	99,20	99,10	99,90	99,37	99,90	99,50	

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP – Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2021	PoI/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	97,40%	97,40%	98,98%	98,98%	96,09%	96,09%	
Capaian	100%	97,40%	97,40%	98,98%	98,98%	96,09%	96,09%	

Dalam Pengukuran kinerja tahun 2021 KPKNL Samarinda Mempunyai 10 sasaran strategis dan 19 IKU yang secara keseluruhan mempunyai persentase hasil yang cukup baik secara perspektif dan bobot.

1. Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2017-2021

Kinerja KPKNL Samarinda sejak tahun 2017-2021 secara garis besar dapat dikatakan cukup memuaskan meski ada beberapa target yang belum dapat tercapai khususnya pada tahun 2020. Meskipun demikian, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian nasional, capaian kinerja KPKNL Samarinda pun semakin meningkat. Kinerja tersebut dapat dibagi dalam beberapa bidang yaitu:

1) Pengelolaan Kekayaan Negara

Program pengelolaan kekayaan negara merupakan suatu peran yang sangat strategis bagi DJKN pada umumnya dan KPKNL Samarinda pada khususnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJKN tahun 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan dan 4 sasaran strategis. Peran DJKN dalam sasaran tersebut diwujudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.

KPKNL Samarinda juga berusaha melakukan pengelolaan negara yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *the highest and best use*. Kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Program sertifikasi tanah pemerintah semenjak tahun 2017-2021 mencapai:

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2017	17	17	100,00%
2	2018	10	17	170,00%
3	2019	46	48	104,35%
4	2020	51	51	100,00%
5	2021	82	82	100,00%

Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, khususnya terkait pemanfaatan barang milik negara, terdapat kegiatan pendukung berupa penilaian BMN yang dikoordinasikan oleh Seksi Pelayanan Penilaian. Dalam kurun waktu 2017-2021 penilaian yang dilakukan adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu juga ada penilaian terhadap barang rampasan Bea Cukai dan Barang Milik Daerah (BMD).

Hasil dari pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian adalah berupa laporan Penilaian yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN maupun BMD.

2) Penerimaan dan Pengamanan Penerimaan Negara

Di bidang penerimaan dan pengamanan penerimaan negara ini mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor piutang negara dan juga penerimaan di sektor lelang. Ditilik dari data capaian kinerja sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat dikatakan kinerja KPKNL Samarinda pada tahun 2017-2021 cukup baik dan masih ada potensi yang dapat digali serta ditingkatkan lagi pada periode berikutnya. Adapun di sektor lelang, kinerja KPKNL Samarinda dalam kurun waktu 2017-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Data Capaian Pokok Lelang 2017-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2017	30,400,000,000	38,616,767,836	127%
2	2018	40,000,000,000	548,700,391,619	1372%
3	2019	151,989,000,000	126,506,082,773	83.23%
4	2020	136,800,000,000	137,279,334,372	100,35 %
5	2021	150,000,000,000	273,087,943,996	182,06 %

Sedangkan di sektor piutang negara, kinerja KPKNL Samarinda tergambar dalam tabel:

Tahun	BIAD			BKPN SELESAI		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2017	11.315.545	23.445.108	207.19	31	38	122.58
2018	21.026.125	24.609.686	117.04	20	48	240
2019	15.988.134	46.389.073	290.15	79	145	183.54
2020	30.000.000	40.549.549	135,16	180	505	280,56
2021	35.000.000	74.671.022	213,35	400	557	139,25

2. Proyeksi Kinerja KPKNL Samarinda tahun 2022-2026

Dengan memperhitungkan capaian kinerja yang telah diraih oleh KPKNL Samarinda tahun 2017-2021, dapat kita proyeksikan target kinerja KPKNL Samarinda untuk tahun 2022-2026 yang dibagi dalam beberapa bidang yaitu:

1) Pengelolaan Kekayaan Negara

Program pengelolaan kekayaan negara adalah salah satu cerminan tugas dan fungsi KPKNL Samarinda dalam rangka mewujudkan peranan strategis bagi DJKN sebagai *distinguished asset manager*. Peran DJKN tersebut diwujudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang efisien serta memberi manfaat finansial dan sosial.

KPKNL Samarinda memproyeksikan target untuk 2022-2026 dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai berikut:

Target Program Sertifikasi Tanah Pemerintah 2021-2025

No	Tahun	Target
1	2022	84
2	2023	88
3	2024	92
4	2025	96
5	2026	100

2) Penerimaan dan Pengamanan Penerimaan Negara

Capaian pada bidang penerimaan dan pengamanan penerimaan negara mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor piutang negara dan juga penerimaan di sektor lelang. Capaian terkait PNBP tersebut merupakan salah satu

aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan target yang ditentukan.

Kinerja KPKNL Samarinda dalam kurun waktu 2022-2026 pada bidang Piutang Negara dan Lelang dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Proyeksi Target Pokok Lelang tahun 2022-2026

No	Tahun	Target
1	2022	120.000.000.000
2	2023	130.000.000.000
3	2024	140.000.000.000
4	2025	150.000.000.000
5	2026	160.000.000.000

Proyeksi Target Biaya Administrasi Penyelesaian Piutang Negara tahun 2022-2026

No	Tahun	Target
1	2022	30.000.000
2	2023	32.000.000
3	2024	34.000.000
4	2025	36.000.000
5	2025	38.000.000

Proyeksi Target BKPN selesai tahun 2022-2026

No	Tahun	Target
1	2022	350
2	2023	375
3	2024	400
4	2025	425
5	2025	450

3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam implementasi/penerapan konsep *balance scorecard* visi dan misi yang telah diformulasikan, selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah sasaran strategis. Adapun sasaran strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) dan/atau apa yang ingin dilakukan atau apa yang seharusnya kita miliki (*input*).

Peta strategis merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis KPKNL Samarinda. Untuk mencapai sasaran capaian kinerja tahun 2021, KPKNL Samarinda menggunakan 3 standar perspektif *balance scorecard* yaitu *Stakeholder/Customer*, *Internal Process* dan *Learning and Growth*:

a) *Stakeholder/Customer Perspective* (40%)

Mengukur standar penilaian kinerja terkait dengan *financial sustainability* dan yang berorientasi pada keinginan pengguna layanan, aspek-aspek terkait hal ini antara lain:

1. Terhadap Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

1.1. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 tercapai sebesar 121,79% dari target awal sebesar 100% dengan nominal Rp. 20.045.057.606,00 Nilai manfaat ekonomi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang meliputi:

- 1) Realisasi Nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN
- 2) Realisasi Nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Piutang Negara
- 3) Realisasi Nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Lelang

1.2. Persentase tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK mencapai 85,32% dari target awal sebesar 62%. Persentase kesesuaian penggunaan BMN yang cukup tinggi tersebut menunjukkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Kekayaan negara yang dioptimalkan penggunaannya meliputi:

- 1) pemanfaatan kekayaan negara melalui Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Pinjam Pakai, Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS);
- 2) penetapan status penggunaan kekayaan negara yang meliputi penetapan status penggunaan, hibah masuk, dan penetapan aset yang berasal dari aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), aset eks. kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- 3) tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah dari konversi aset.

Keberhasilan pencapaian target tersebut juga didukung dengan upaya-upaya dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara yang optimal, antara lain:

- 1) Penertiban barang milik negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN;
- 2) Penyelesaian permohonan penilaian atas kekayaan negara yang akan diutilisasi;
- 3) Peningkatan kesadaran pengguna barang agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan, melalui kegiatan:
 - a) Bimbingan teknis mengenai pengelolaan BMN kepada K/L;
 - b) Sosialisasi peraturan terkait dengan pengelolaan BMN kepada K/L;
 - c) Pembinaan kepada K/L yang berkelanjutan.

2. Customer Perspective

Terhadap Sasaran Strategis Pelayanan Publik yang Prima.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) pada kantor pelayanan terealisasi sebesar 4,78 dari target sebesar 4,45 yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Samarinda diperoleh dengan melakukan survey terhadap Pengguna Layanan di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yaitu para pemangku kepentingan/*stakeholder* Kementerian/Lembaga, Seksi Piutang Negara yaitu para penyerah piutang seperti perbankan/non perbankan dan penanggung utang, Seksi Pelayanan Penilaian yaitu satker Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan penilaian, dan Seksi Pelayanan Lelang yaitu para pemohon lelang maupun pengguna jasa lelang.

Aspek penilaian dilakukan terhadap prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, staf kantor dan kondisi kantor.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa *stakeholder* KPKNL Samarinda sangat puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh KPKNL Samarinda.

b) Internal Process Perspective (30%)

Mengukur suatu proses dalam memberikan layanan kepada *Stakeholder* dan *Customer*.

a. Terhadap Sasaran Strategis Manajemen Pelayanan yang Berkualitas

Indikator Kinerja Utama persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara terealisasi sebesar 98% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 85%.

b. Terhadap Sasaran Strategis Tata Kelola Kekayaan Negara yang Akuntabel

Indikator Kinerja Utama Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dari target yang ditetapkan sebanyak 82 sertifikat, KPKNL Samarinda berhasil merealisasikan 82 Sertifikat untuk Tanah BMN.

Indeks Kinerja Utama tersebut dapat tercapai karena adanya sinergi yang baik antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, Satuan Kerja Terkait, dan Badan Pertanahan Nasional.

c. Terhadap Sasaran Strategis Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang akuntabel

- a. Indeks Kinerja Utama presentase efektivitas penyelesaian BKPN yang ditargetkan sebanyak 400 KPKNL Samarinda berhasil menyelesaikan berkas BKPN Sebanyak 557.
- b. Indeks Kinerja Utama Persentase hasil lelang terealisasi sebesar 100,35% dari target Pokok lelang kelas I yang ditetapkan sebesar Rp. 86.000.000.000, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda dapat merealisasikan Pokok Lelang kelas I sebesar Rp. 129.152.979.396. Sementara dari sektor Pokok Lelang Pegadaian terealisasi sebesar Rp. 143.934.964.600 dari target sebesar Rp. 64.000.000.000. Pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pada periode selanjutnya, mengetahui bahwa tahun ini pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut berdasarkan persentase gabungan dari Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian. Hal ini menjadi catatan tersendiri untuk KPKNL Samarinda untuk dapat memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat lebih tertarik untuk menjadikan lelang sebagai salah satu pilihan dalam bertransaksi jual beli. Mengingat sebagian wilayah di Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, terdapat potensi akan meningkatnya minat beli masyarakat terhadap lelang di wilayah kerja KPKNL Samarinda.
- c. Indeks Kinerja Utama Persentase Produktifitas Lelang dapat terealisasi sebesar 41,83% dari target yang ditetapkan sebesar 35% yang didapat dari jumlah frekuensi lelang laku tahun 2021.

3. Terhadap Sasaran Strategis Edukasi yang efektif

Indeks Kinerja Utama Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi dapat terealisasi sebesar 96,40 dari target 91 dengan nilai capaian 102,88%.

c) *Learning & Growth Perspective (30%)*

Menggambarkan kemampuan SDM dalam unit organisasinya untuk melakukan perbaikan dan perubahan

1. Terhadap sasaran strategis SDM yang kompeten

Indeks Kinerja Utama Persentase pengembangan kompetensi pegawai mendapatkan nilai capaian yang memuaskan dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%.

2. Terhadap sasaran Strategis Sistem manajemen informasi yang andal

Indeks Kinerja Utama Persentase Implementasi *e-auction* mendapat nilai capaian sebesar 100% dari target 92% yang berasal dari Realisasi Frekuensi *e-Auction* dengan Realisasi Frekuensi *e-conventional auction*

3. Terhadap Sasaran strategis Pengelolaan Anggaran yang Optimal

Indeks Kinerja Utama Persentase Kualitas pelaksanaan anggaran dari target 95,5% dapat terealisasi sebesar 96,09%.

4) **Rencana Aksi**

Di tahun 2022 mendatang, diharapkan dengan adanya isu yang strategis yaitu pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur dapat dimanfaatkan untuk menjaring minat masyarakat untuk mengikuti Lelang terutama dibidang Properti, dari segi Pengelolaan Aset Negara dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara akan Dibangun aset aset Baru yang kemungkinan Pengelolaannya akan berada di KPKNL Samarinda. Dari segi Piutang Negara penagihan piutang Negara diatas 500 juta akan menjadi Prioritas KPKNL Samarinda di tahun depan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dengan berakhirnya proses e-Rekon & LK KPKNL Samarinda, berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2021, terhitung realisasi belanja unit KPKNL Samarinda pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 1.767.475.995,00** atau **94,50%** dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Samarinda sebesar **Rp. 1.870.382.000,00**.

Realisasi anggaran tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:

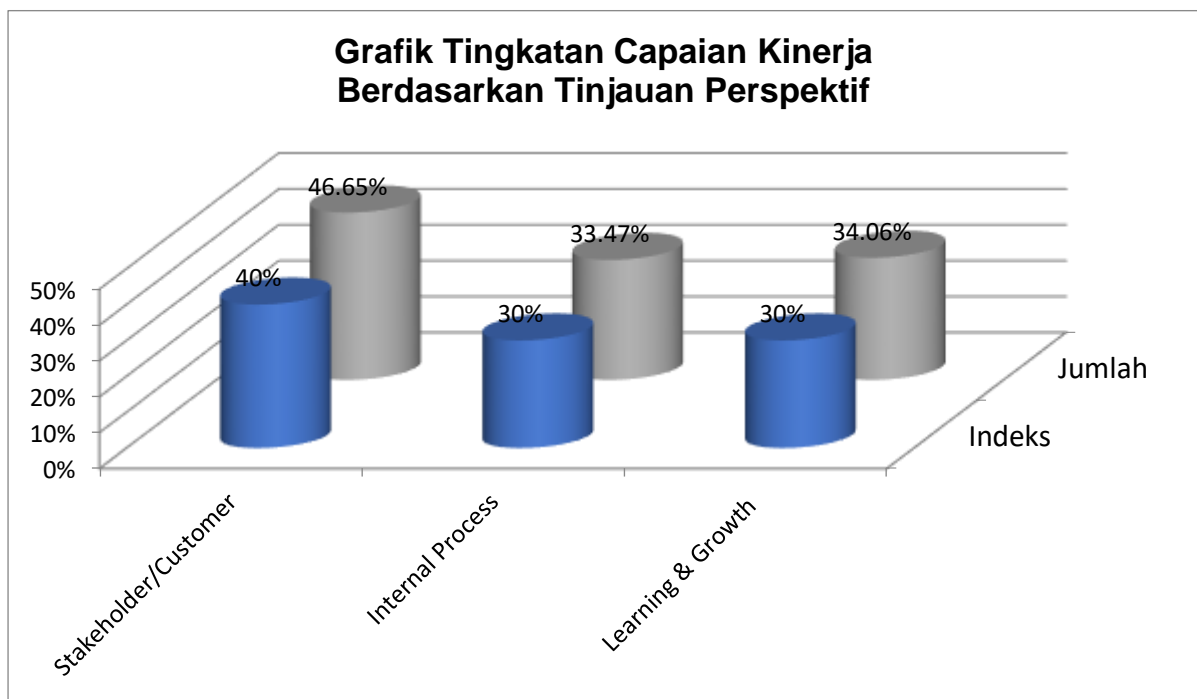
Program/Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp. 217.574.000	Rp. 188.156.085
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp. 408.000	Rp. 136.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp. 812.000	Rp. 760.000
3. Pengelolaan Aset	Rp. 216.354.000	Rp. 187.260.085
Dukungan Manajemen	Rp. 1.652.808.000	Rp. 1579.319.910
1. Legislasi dan Litigasi	Rp. 10.388.000	Rp8.812.500
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp. 1.384.738.000	Rp1.321.640.994
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 1.088.000	Rp. 0
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp. 16.777.000	Rp. 15.240.000

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda tahun 2021 ditetapkan sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu *Three DJKN* yang terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja apabila dilihat dari tinjauan perspektif dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini:



**TABEL : TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 KPKNL SAMARINDA
BERDASARKAN TINJAUAN PERSPEKTIF**

NO	PERSPEKTIF	INDEKS	JUMLAH
1	<i>Stakeholder/Customer Perspektif</i>	40%	46,65%
2	<i>Internal Procees Perspective</i>	30%	33,47%
3	<i>Learning & growth Perspective</i>	30%	34,06%
JUMLAH CAPAIAN KINERJA		100%	114,18%

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dilihat pada grafik dan tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian sasaran tahun 2021 adalah **114,18%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja KPKNL Samarinda tahun 2021 secara rata-rata telah melampaui indeks yang ditetapkan. Dengan tercapainya realisasi *stakeholder/customer perspective* tercapai sebesar 46,65%, dapat diartikan bahwa tujuan utama organisasi telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga dengan realisasi *internal process perspective* sebesar 33,47% dan *learning & growth perspective* sebesar 34,06%, hal ini menandakan bahwa proses investasi yang berupa peningkatan SDM, anggaran yang maksimal serta pelaksanaan proses organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku telah mendukung keberhasilan tujuan organisasi.

B. HAMBATAN DAN HARAPAN

Hambatan dan harapan yang ditemui oleh KPKNL Samarinda sepanjang periode tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada Seksi Pelayanan Lelang, beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Adanya permasalahan hukum terhadap objek lelang;
- 2) Objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan yang masih dikuasai oleh debitur;
- 3) Harga limit yang ditetapkan oleh penjual masih banyak yang berpatokan pada nilai Hak Tanggungan (Nilai Pasar) yang terlalu tinggi, bukan berdasarkan dari Nilai Likuidasi;
- 4) Kurangnya pemasaran oleh penjual terhadap objek lelang itu sendiri;
- 5) Menurunnya minat beli masyarakat di Wilayah Kerja KPKNL Samarinda yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Kalimantan Timur yang menurun seiring dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah sektor mineral dan batu bara serta pengaruh adanya wabah *Covid-19*.

Harapan terhadap kendala di atas, adanya kepastian hukum terhadap objek lelang sehingga mengundang minat calon pembeli. Penjual dalam menetapkan nilai limit didasarkan pada nilai likuidasi serta lebih aktif melakukan pemasaran. Selain itu, dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diharapkan dapat mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap properti. Potensi melonjaknya minat masyarakat akan properti dapat dimanfaatkan oleh KPKNL Samarinda sebagai salah satu bahan untuk mempromosikan lelang ke masyarakat luas.

Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Samarinda dalam meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, adalah dengan melanjutkan pelaksanaan penggalian potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan



dan melakukan monitoring dan evaluasi lelang melalui peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang secara intensif.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, kami harapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Samarinda, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Secara eksternal, Laporan Kinerja (LAKIN) harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*. Dengan demikian pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN



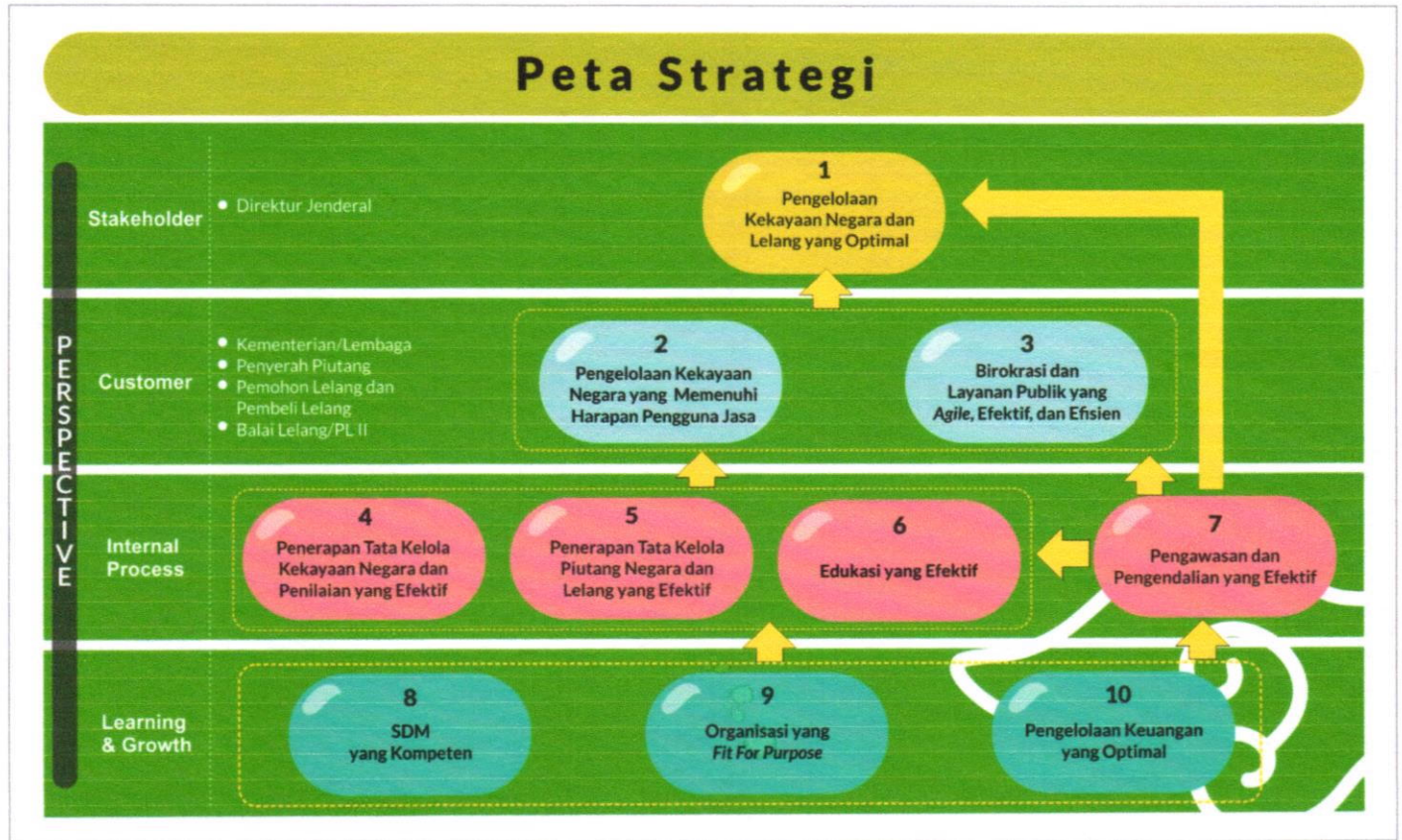
**KONTRAK KINERJA
NOMOR 8/KN.25/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 262.123.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 19.249.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 21.504.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp 221.370.000,00
Dukungan Manajemen	Rp 1.831.391.000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 10.388.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.796.386.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 7.840.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 16.777.000,00

Samarinda, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan
Timur dan Utara

Surya Hadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Samarinda

Bimo Aryo

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92	92	92	92	92	92	92
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,45	4,45
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	91	-	91	91	91
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Samarinda, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Samarinda,



Bimo Aryo


Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Surya Hadi	1	Nama	Bimo Aryo
2	NIP	19630421 199203 1 002	2	NIP	19760204 200212 1 002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda / IV.c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina / IV.a
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudka Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	92 (skala 100)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,45 (skala 5)	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91 (skala 100)	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
18	Melaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
19	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	Rp 2,09 M

Samarinda, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,



Surya Hadi
NIP 19630421 199203 1 002

PNS yang Dinilai,



Bimo Aryo
NIP 19760204 200212 1 002

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Penerapan Tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif IKU: Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi	Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah	1. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan di lingkup KPKNL Samarinda; 2. Jumlah bidang tanah BMN yang disampaikan kepada BPN dan direkomendasikan untuk disertifikasi	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp 8.100.000,00

Samarinda, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Samarinda,



Bimo Aryo
NIP 19760204 200212 1 002

LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kepala Kepala KPKNL Samarinda, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda untuk periode Kontrak Kinerja tahun 2021 yang meliputi :

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
- b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP);
- c. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara;
- d. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang;
- e. Persentase Realisasi Pokok Lelang;
- f. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL;
- g. Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi;
- h. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- i. Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian;
- j. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN;
- k. Persentase Produktivitas Lelang;
- l. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction;
- m. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN;
- n. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
- o. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara;
- p. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- q. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja;
- r. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator;
- s. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Januari 2021

Kepala Seksi Kepatuhan Internal



Heldi Muslih
NIP 19650905 198603 1 001

Kepala KPKNL Samarinda



Bimo Aryo
NIP 19760204 200212 1 002

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1a-CP

Perspektif: Stakeholder

Sasaran Strategis: 1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Deskripsi Sasaran Strategis: Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:
1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2) pengurusan piutang negara; dan
3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:
1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating).
3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Utama: 1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Deskripsi:

Definisi: Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Formula Pengukuran

$$\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja

Formula Optimalisasi

$$\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja

Bentuk Optimalisasi

- Penggunaan BMN
- Pemanfaatan BMN

Pembobotan

Formula Pengukuran	75%
Formula Optimalisasi	25%

Satker Target: Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya pada satker untuk seluruh Kanwil DJKN sesuai data terlampir.

Tujuan Strategis: Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/ Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi PKN

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PKN

Sumber Data: Data Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Perhitungan

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I					-
Triwulan II					50%
Triwulan III					55%
Triwulan IV					62%
Tahunan					62%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1b-CP

Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis: Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.
Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:
1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2) pengurusan piutang negara; dan
3) pelayanan lelang.
Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:
1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating).
3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi:

Definisi:
Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1). PNB BMN
Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNB yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNB yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah **disetorkan ke kas negara**)
b. pemanfaatan barang milik negara; dan
c. pemindahtanganan barang milik negara.
yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2). PNB Piutang Negara (PNBP PN)
Nilai pengurusan piutang negara berupa **biaya administrasi pengurusan piutang negara** yang diupayakan oleh KPKNL.

3). PNB Lelang
Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
c. biaya permohonan lelang,
d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Formula:
Capaian = $\frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$

Tujuan Strategis:
Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Satuan Pengukuran:

Jenis Aspek Target Pada SKP: (X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU: () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU: () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Unit/Pihak Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Cascading IKU: (X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading

Metode Cascading: () Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: () Sum () Average (X) Raw Data

Polarisasi: (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Konversi 120: () Ya (X) Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Triwulan I	5%	20,14%	5%	26,18%		10%
Triwulan II	30%	35,47%	30%	35,78%		30%
Triwulan III	60%	169,33%	60%	48,15%		60%
Triwulan IV	100%	181,85%	100%	96,12%		100%
Tahunan	100% (Rp 39.452.169.759)	Rp72.619.345.910	100% (Rp 15.454.000.000)	Rp14.854.815.238		100% (Rp 16.459.000.000)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1c-CP

Perspektif :

Sasaran Strategis :

Deskripsi Sasaran Strategis :
 Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.
 Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:
 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
 2) pengurusan piutang negara; dan
 3) pelayanan lelang.
 Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:
 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating).
 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Utama :

Deskripsi :
Definisi:
 IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga **31 Desember 2017**. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.
 Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:
 1. Angsuran
 2. Pelunasan
 3. Penarikan/ Pengembalian
 4. Pelunasan
 5. PSBDT
 6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

Formula :

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$$

Tujuan:
 Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target Pada SKP : Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi IKU : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018			2020		2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Triwulan I	-	-	-	N/A	3.304.063.950	25%
Triwulan II	-	-	-	N/A	3.306.791.222	50%
Triwulan III	-	-	-	N/A	3.668.097.779	75%
Triwulan IV	-	-	-	N/A	4.426.347.394	100%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	4.426.347.394	100% (Rp 5.000.000.000)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

2a-CP

Perspektif:	Customer
Sasaran Strategis:	2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
Deskripsi Sasaran Strategis:	Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyalpaimannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Indikator Kinerja Utama: 2a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara

Definisi:
Layanan Kekayaan Negara yang diukur:

1. Persetujuan/ Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL					
a) Jumlah Objek 1-50	100= <10 hari kerja 90= 10-15 hari kerja 80= 16-24 hari kerja 70=25 hari kerja 60= 26-32 hari kerja 50 = 33-40 hari kerja 40 = > 40 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu Sangat tidak tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN dan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
b) Jumlah Objek 51-100	100= <10 hari kerja 90= 10-15 hari kerja 80= 16-26 hari kerja 70=27 hari kerja 60= 28-35 hari kerja 50 = 36-40 hari kerja 40 = > 40 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu Sangat tidak tepat waktu			
c) Jumlah Objek >100	100= <10 hari kerja 90= 10-19 hari kerja 80= 20-28 hari kerja 70=29 hari kerja 60= 30-40 hari kerja 50 = 41-50 hari kerja 40 = > 50 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu Sangat tidak tepat waktu			
2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja 90 = 3 hari kerja 80 = 4 hari kerja 70 = 5 hari kerja 0 = > 5 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
3. Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja 90 = 3 s.d. 4 hari kerja 80 = 5 s.d. 6 hari kerja 70 = 7 hari kerja 0 = > 7 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
4. Penetapan Jadwal Lelang	100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja (SOP LU) 70 = 3 hari kerja 0 = > 3 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu	Dokumen Permohonan Lelang telah diterima Lengkap	Seksi Lelang KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100 = 1 hari kerja 0 = > 1 hari kerja	Sangat tepat waktu Tidak tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100 = 1 hari kerja 0 = > 1 hari kerja	Sangat tepat waktu Tidak tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100 = 1 hari kerja 0 = > 1 hari kerja	Sangat tepat waktu Tidak tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi Lelang KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100 = 1 hari kerja 0 = > 1 hari kerja	Sangat tepat waktu Tidak tepat waktu			
9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja 70 = 3 hari kerja 0 = > 3 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu		Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100 = 1 s.d. 4 hari kerja 90 = 5 s.d. 9 hari kerja 80 = 10 s.d. 14 hari kerja 70 = 15 hari kerja 0 = > 15 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja 70 = 3 hari kerja 0 = > 3 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Sertifikasi/ Atas Nilai Pengikatan	100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja 80 = 3 hari kerja 70 = 4 hari kerja 0 = > 4 hari kerja	Sangat tepat waktu Tepat waktu Tidak tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100 = 1 hari kerja 0 = > 1 hari kerja	Sangat tepat waktu Tidak tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	100 = 1 hari kerja 0 = > 1 hari kerja	Sangat tepat waktu Tidak tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan

Formula:
Capaian = $\frac{\sum \text{indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara lingkup Karwil dan KPKNL}}{\sum \text{jumlah permohonan layanan kekayaan negara lingkup Karwil dan KPKNL}}$

Tujuan Strategis:
Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal

Satuan Pengukuran:	Indeksasi
Jenis Aspek Target pada SKP	(X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU:	(X) High () Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU:	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Lelang, Seksi HI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Lelang, Seksi HI
Sumber Data:	Rekapitulasi monitoring penyelesaian layanan KPKNL
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading () Non-Cascading
Metode Cascading:	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	() Sum (X) Average () Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() Sum () Average (X) Raw data
Polarisasi:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Konversi 120:	() Ya (X) Tidak

Tabel Data	Periode Pelaporan	2019		2020		2021
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Triwulan I	85	99,20	90	98,48	92
	Triwulan II	85	98,46	90	99,47	92
	Triwulan III	85	99,06	90	97,40	92
	Triwulan IV	85	98,88	90	98,27	92
	Tahunan	85	98,90	90	98,41	92

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

2b-CP

Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi:

Definisi:
Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.
Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:
Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Satuan Pengukuran:

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Unit/Pihak Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)
Triwulan I	10%	24,64%	10%	28,74%	20%
Triwulan II	30%	37,57%	30%	40,85%	40%
Triwulan III	60%	62,29%	60%	74,23%	70%
Triwulan IV	100%	83,23%	100%	100,35%	100%
Tahunan	100% (Rp 151.989.000.000)	83,23% (Rp 126.506.082.773)	100% (Rp 136.800.000.000)	100,35% (Rp 137.279.334.372)	100% (Rp 150.000.000.000)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

3a-CP

Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi:

Definisi:
Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

0 ≤ x ≤ 1 = tidak puas
1 < x ≤ 2 = kurang puas
2 < x ≤ 3 = cukup puas
3 < x ≤ 4 = puas
4 < x ≤ 5 = sangat puas

Formula:

Capaian = Rata-rata Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan KPKNL

Tujuan Strategis:
Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan

Satuan Pengukuran:

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Unit/Pihak Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	4,37	4,72	4,4	4,77	4,45

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

4a-CP

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif

Deskripsi Sasaran Strategis:
Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin **terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi**. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.
Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator Kinerja Utama: 4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi

Deskripsi:
Definisi:
Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penukiran BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan penerbitan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikasi	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan penerbitan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikasi; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertifikasi.	1. Menyimpan asli sertifikasi; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertifikasi; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:
1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikasi
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikasi
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.
Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Formula:
Capaian = $\frac{\sum \text{bidang tanah yang telah disertifikasi}}{\sum \text{target bidang tanah yang akan disertifikasi}} \times 100\%$

Tujuan Strategis:
Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Satuan Pengukuran: Persen

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi PKN

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PKN

Sumber Data: Rekapitulasi data perkembangan sertifikasi pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	20%	0%	20%	84,31%	20%
Triwulan III	60%	104,35%	60%	100%	60%
Triwulan IV	100%	104,35%	100%	100%	100%
Tahunan	100% (46 bidang)	104.35% (48 bidang)	100% (51 bidang)	100% (51 bidang)	100% (82 Bidang)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

4b-CP

Perspektif :

Sasaran Strategis :

Deskripsi Sasaran :

Strategis :

Indikator Kinerja Utama :

Deskripsi : **Definisi:**
Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.
Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).
Formula
$$\frac{\sum \text{aset yang dievaluasi kinerjanya}}{\text{target aset yg akan dievaluasi}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:
Terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang..

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target pada SKP :

Tingkat Kendali IKU :

Tingkat Validitas IKU :

Unit/Pihak penanggungji:

Unit/Pihak penyedia data:

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU :

Metode Cascading :

Jenis Konsolidasi Perior:

Jenis Konsolidasi Lokas:

Polarisasi :

Periode Pelaporan :

Konversi 120 :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I			25%	0%	15%
Triwulan II			50%	80,26%	45%
Triwulan III			80%	100%	75%
Triwulan IV			100%	100%	100%
Tahunan	N/A	N/A	100% (76 Aset)	100% (76 Aset)	100% (27 NUP)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

4c-CP

Perspektif : Internal Process Perspective

Sasaran Strategis : 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif

Deskripsi Sasaran Strategis :
Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin **terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi**. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.
Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator Kinerja Utama : 4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Deskripsi :
Definisi:
Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.
Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).
Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.
Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.
Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama
Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.
Formula: Rata-rata Deviasi
$$\text{Deviasi} = \frac{|A-B|}{B}$$

A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan
B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan
| | = Nilai Mutlak
contoh 1
Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%
contoh 2
Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan (diskon) 50% dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)
contoh 3
Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian berdasarkan kebijakan pengelola dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)
Tujuan Strategis:
Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN

Satuan Pengukuran : Persentase

Jenis Aspek Target pada SKP : Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Seksi Penilaian

Unit/Pihak Penyedia Data : Seksi Penilaian

Sumber Data : Surat Persetujuan/Penolakan Pengelolaan dan form rekapitulasi ketergunaan hasil penilaian

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi Indeks Capaian 120 : Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A		30%	20,10%	22%
Triwulan II	N/A		30%	0%	22%
Triwulan III	N/A		30%	0%	22%
Triwulan IV	N/A		30%	0%	22%
Tahunan	N/A		30%	5,03%	22%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5a-CP

Perspektif :

Sasaran Strategis :

Deskripsi Sasaran Strategis :

Indikator Kinerja Utama :

Deskripsi :

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target Pada SKP :

Tingkat Kendali IKU :

Tingkat Validitas IKU :

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU :

Metode Cascading :

Jenis Konsolidasi Periode :

Jenis Konsolidasi Lokasi :

Polarisasi IKU :

Periode Pelaporan :

Konversi 120 :

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target %	Realisasi	Target %
Triwulan I	-	-	10%	24,17%	25%
Triwulan II	-	-	40%	63,61%	50%
Triwulan III	-	-	75%	148,89%	75%
Triwulan IV	-	-	100%	280,56%	100%
Tahunan	N/A	N/A	100% (180 BKP)	280,56%	100% (400 BKP)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5b-CP

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis: 5.Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis:
Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.
Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator Kinerja Utama: 5b-CP Persentase produktivitas lelang

Deskripsi:
Definisi:
Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.
Formula:
Capaian:
$$\frac{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Laku} - \sum \text{Realisasi frekuensi Lelang Sukareta atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang} \leq \text{Rp } 500.000,-}{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang} - \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang} \leq \text{Rp } 500.000,-} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:
Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi Lelang

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi Lelang

Sumber Data: Rekapitulasi laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)
Triwulan I	15%	35,19%	15%	26,71%	15%
Triwulan II	20%	27,90%	20%	26,24%	20%
Triwulan III	25%	26,72%	25%	31,60%	25%
Triwulan IV	32%	33,55%	34%	34,99%	35%
Tahunan	32%	33,55%	34%	34,99%	35%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5c-CP

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis: 5.Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis: Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator Kinerja Utama: 5c-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Definisi:

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Contoh perhitungan realisasi:

Capaian <i>e-Auction</i> (minimal harus 80%)	Pelaksanaan <i>e-Conventional</i>	Total
82%	10%	92%
87%	5%	92%
92%	0%	92%

Deskripsi:

Ket : Agar tidak diperhitungkan frekuensi lelang yang ditargetkan pada Pejabat Lelang Kelas II

Formula:

$$\left(\frac{\sum \text{Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}}{\sum \text{Frekuensi Lelang}} + \frac{\sum \text{Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uangnya jaminannya menggunakan virtual account}}{\sum \text{Realisasi Frekuensi lelang}} \right) \times 100\%$$

Tujuan Strategis:

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNPB lelang, dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi Lelang

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi Lelang

Sumber Data: Laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang

Jenis Cascading: Cascading Peta Cascading Non-Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	10%	100%	10%	100%	92%
Triwulan III	30%	100%	30%	100%	92%
Triwulan III	50%	100%	50%	100%	92%
Triwulan IV	90%	100%	90%	100%	92%
Tahunan	90%	100%	90%	100%	92%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5d-CP

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis 5.Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis: Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.
Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator Kinerja Utama: 5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Definisi:
PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:
1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal **tanggal 7** pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBPN dari Bidad PPN adalah 15%
Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

Formula:

Realisasi Deviasi PNBPN Bidad PPN	Formula IKU: $(A-B) / B$
	A: Total Data Realisasi PNBPN Bidad PPN pada Aplikasi FocusPN
	B: Total Data Realisasi PNBPN Bidad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN

Deskripsi:

Realisasi Deviasi PNBPN Bea Lelang	Formula IKU: $(A-B) / B$
	A: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*
	B: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN

Perhitungan Total Realisasi		
Periode Laporan	Rumus	Periode Data
Q1:	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Mar 2021
Q2	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Jun 2021
Q3	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d.Sep 2021
Q4	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Dec 2021

Tujuan Strategis:
Akurasi penyajian Data PNBPN DJKN

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi PN, Seksi Lelang

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PN, Seksi Lelang

Sumber Data: Laporan Pembukuan Data PNBPN DJKN dan Aplikasi FocusPN/Dropbox/OM SPAN/Aplikasi lainnya yang berlaku

Jenis Cascading: Cascading Peta Cascading Non-Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	12,5%
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	12,5%
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	12,5%
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	12,5%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	12,5%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

6a-N

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis: 6. Edukasi yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk **meningkatkan pemahaman atas proses bisnis** yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:
1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.
Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila **pihak yang didukasi memberikan feedback yang positif** atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama: 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Definisi:
Edukasi kepada pengguna jasa
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
2) kualitas materi (bobot 15%),
3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu (Tersedia kuesioner Bimbingan Teknis secara Offline dan Online)

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas	Skala
Sangat Efektif	$86 \leq x \leq 100$
Efektif	$70 \leq x \leq 85$
Kurang efektif	$40 < x < 70$
Tidak Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Tidak Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Formula:
Capaian IKU = Rata-Rata Tingkat Efektivitas Edukasi kepada Pengguna Jasa

Tujuan Strategis:
1) meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan
2) mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat

Satuan Pengukuran: Indeksasi

Jenis Aspek Target pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Lelang

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Lelang

Sumber Data: Hasil rekapitulasi kuisisioner

Jenis Cascading: Cascading Peta Cascading Non-Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	88	95,16	90	92,48	91
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	88	92,39	90	92,71	91
Tahunan	88	92,39	90	92,60	91

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

7a-CP

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis: 7. Pengawasan dan Pengendalian Yang efektif

Deskripsi Sasaran Strategis: Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:
a. Terelesainya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja Utama: 7a-CP Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan BMN

Deskripsi:

Definisi: Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 s.d. semester I 2021 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 s.d. semester I 2021}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi PKN

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PKN

Sumber Data: Rekapitulasi Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (SE.02/KN/2019)

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I					
Triwulan II			40%	79,17%	40%
Triwulan III					
Triwulan IV	70%	88%		91,84%	
Tahunan	70%	88%	80%	91,84%	85%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

8a-N

Perspektif :

Sasaran Strategis :

Deskripsi Sasaran Strategis :

Indikator Kinerja Utama :

Deskripsi Indikator Kinerja Utama :

Definisi:

mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).
1 jamlat adalah 45 menit
Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total **24 jamlat**.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1.
Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya
- Pegawai pada unit non-eselon

Formula:

Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan

<p style="text-align: center;">Capaian Utama = (Jumlah bawahan telah memenuhi kriteria / Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU) x 100%</p>	<p style="text-align: center;">Capaian Tambahan = Jumlah Bawahan telah melebihi Kriteria / Jumlah Bawahan (Sesuai Lingkup IKU) x 20%</p>
---	--

Tujuan

Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non Peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi Indeks Capaian 120 : Ya Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021
	Target	Realisasi	target	realisasi	Target
Q1	N/A	N/A	15%	87,83%	15%
Q2	N/A	N/A	40%	120%	40%
Q3	N/A	N/A	75%	120%	75%
Q4	N/A	N/A	100%	120%	100%
Tahunan	N/A	N/A	100%	120%	100%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

9a-N

Perspektif: Learning and Growth

Sasaran Strategis: 9. Organisasi yang fit-for-purpose

Deskripsi Sasaran Strategis: Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Indikator Kinerja Utama: 9a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Definisi:
Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Deskripsi: Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Formula:
Nilai reviu pengelolaan kinerja

Tujuan Strategis:
Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Satuan Pengukuran: Indeks

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Seksi KI

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi KI

Sumber Data: Hasil penilaian reviu pengelolaan kinerja Kantor Pusat DJKN

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non-peta Non-Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	-	-	70	86,6	75
Tahunan	N/A	N/A	70	86,6	75

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

9b-N

Perspektif : Learning and Growth

Sasaran Strategis : 9. Organisasi yang fit-for-purpose

Deskripsi Sasaran Strategis : Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan

Indikator Kinerja Utama : 9b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Deskripsi :

Definisi:
Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi

Formulasi:
Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:
Contoh rincian pertanyaan kuesioner untuk menggali beberapa aspek di atas adalah:
Indeks efektivitas setiap pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah rata-rata dari dua parameter sebagai berikut:

1. Kecepatan	No	Nilai/Angka	Waktu pelaksanaan FGD sejak Pra-FGD
	1	100	≤3 hari kerja
	2	90	4 - 7 hari kerja
	3	80	8 - 10 hari kerja
	4	70	>10 hari kerja
5	0	tidak melaksanakan FGD	

2. Feedback peserta Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD

Formulasi IKU Indeks Efektivitas
(40% x nilai kecepatan) + (60% x nilai feedback peserta)

Indeks efektivitas	No	Nilai/Angka	Interpretasi
	1	90 ≤ x ≤ 100	Sangat Efektif
	2	80 ≤ x ≤ 89	Efektif
	3	70 ≤ x ≤ 79	Cukup Efektif
	4	60 ≤ x ≤ 69	Kurang efektif
	5	< 60	Tidak Efektif

Tujuan:
Mengukur efektivitas FGD Pejabat Administrator

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek Target pada SKP : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Pejabat Administrator / Eselon III

Unit/Pihak Penyedia Data : Seksi KI

Sumber Data : Hasil Kuesioner

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I			80	-	80
Triwulan II			80	98,15	80
Triwulan III			80	97,1	80
Triwulan IV			80	97,8	80
Tahunan			80	97,68	80

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

10a-CP

Perspektif :	Learning and Growth
Sasaran Strategis :	10.Pengelolaan Anggaran yang Optimal
Deskripsi Sasaran Strategis :	Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran teresap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.
Indikator Kinerja Utama :	10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Deskripsi :	<p>Definisi: Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.</p> <p>Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.</p> <p>Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.</p> <p>Formula:</p> <p>Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Q1, Q2 dan Q3 = 100% x IKPA Q4= (60% x SMART + 40% x IKPA)</p> <p>Tujuan:</p> <p>Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Jenis Aspek Target :	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU :	() High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Subbagian Umum
Unit/Pihak Penyedia Data :	Subbagian Umum
Sumber Data :	Laporan realisasi anggaran KPKNL Samarinda, SMART-DJA, IKPA DJPB, OMSPAN
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Konversi Indeks Capaian 120:	() Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	95%	-	95,50%
Triwulan II	-	-	95%	-	95,50%
Triwulan III	-	-	95%	93,48%	95,50%
Triwulan IV	-	-	95%	96,56%	95,50%
Tahunan	-	-	95%	96,56%	95,50%

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
PERIODE s.d. TRIWULAN IV
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30.00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							120.00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	85.32%	19%	40%	137.617%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	121.79%	14%	30%	121.788%	120.00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	151.97%	14%	30%	151.97%	120.00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16.65%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							114.57%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	92.00	99.04	11%	44%	107.65%	107.65%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	182.06%	14%	56%	182.06%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							107.42%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.45	4.78	21%	100%	107.42%	107.42%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33.47%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							108.03%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.00%	19%	43%	100.00%	100.00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	106.67%	11%	25%	106.67%	106.67%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.19%	14%	32%	199.14%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							117.05%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	139.25%	14%	25%	139.25%	120.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	41.83%	14%	25%	119.51%	119.51%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi	P/M	92%	100.00%	14%	25%	108.70%	108.70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12.5%	0.00%	14%	25%	200.00%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							105.94%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	91	96.40	14%	100%	105.94%	105.94%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							112.94%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	98.00%	14%	100%	115.29%	115.29%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34.06%	
8	SDM yang kompeten							120.00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120.00%	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	96.04	14%	100%	128.05%	120.00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	99.50	14%	100%	124.38%	120.00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100.62%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	96.09%	14%	100%	100.62%	100.62%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114.18%	hijau

Mengetahui,
 Plh. Kepala KPKNL Samarinda

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
 Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
 Maulana Muhamad H.



Ditandatangani secara elektronik
 Putu Taufani Kusumayani

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2021

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2021	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	5d-CP	P/M	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	MIN/TLK							
	a b		Deviasi Data PNPB Lelang	10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Deviasi Data PNPB Piutang Negara	15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Rata-Rata Target	12.5%							
Capaian IKU					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6	-		Edukasi yang efektif								
	6a-N	P/M	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	91		96.45	96.45		96.45	96.36	96.40
	Capaian IKU					-	96.45	96.45	96.45	96.36	96.40
9	-		Pengawasan dan pengendalian yang efektif								
	7a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAX/TLK							
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L		19	22	22	22	22	22	22
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		4	14	14	26	26	27	27
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020		23	23	23	23	23	23	23
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021		13	27	27	27	27	27	27
Capaian IKU					63.89%	72.00%	72.00%	96.00%	96.00%	98.00%	98.00%
8	-		SDM yang kompeten								
	8a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK							
			Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		10	19	19	21	21	25	25
			Jumlah bawahan total		23	21	21	21	21	25	25
			% Capaian Utama		43.48%	90.48%	90.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		10	19	19	21	21	25	25
			Jumlah bawahan total		23	21	21	21	21	25	25
			% Capaian Tambahan		43.48%	90.48%	90.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Capaian IKU					52.17%	108.57%	108.57%	120.00%	120.00%	120.00%
9	-		Organisasi yang fit for purpose								
	9a-N	P/M	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	MAX/TLK							
			Target/Realisasi	75						96.04	96.04
Capaian IKU					-				128.05%	128.05%	

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2021**

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2021	Realisasi							
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	9b-N	P/M	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	MAX/TLK								
			Target/Realisasi	80	99.00	99.20	99.10	99.90	99.37	99.90	99.50	
			Capaian IKU	-	99.00	99.20	99.10	99.90	99.37	99.90	99.50	
10			Pengelolaan Keuangan yang Optimal									
			10a-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	MAX/TLK						
			Target/Realisasi	95.5%	100.00%	97.40%	97.40%	98.98%	98.98%	96.09%	96.09%	
			Capaian IKU		100.00%	97.40%	97.40%	98.98%	98.98%	96.09%	96.09%	

Mengetahui,
Plh. Kepala KPKNL Samarinda

Samarinda, 07 Januari 2022
Kepala Seksi Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Erwin Maulana Muhamad H.



Ditandatangani secara elektronik
Putu Taufani Kusumayani

KPKNL SAMARINDA



GEDUNG KEKAYAAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Jalan Juanda 6 LT. 1 - 2 Samarinda Kalimantan Timur